

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Periode Tahun 2024

Kode Satker 401909

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping green polygons and rectangles, creating a modern, abstract architectural look.

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Kelurahan Mulia Agung
Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan
Telp/Fax. (0711) 5723669
e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan**

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-31/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana und tuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024

**Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,**


ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel dan Lampiran iv

Pernyataan Tanggung Jawab i

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 5

II. Neraca 7

III. Laporan Operasional 9

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 11

V. Catatan atas Laporan Keuangan 13

 A. Penjelasan Umum 13

 A.1. Dasar Hukum 13

 A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 14

 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 15

 A.4. Basis Akuntansi 16

 A.5. Dasar Pengukuran 16

 A.6. Kebijakan Akuntansi 16

 B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 24

 B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 24

 B.2. Belanja 24

 C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 26

 C.1. Aset Lancar 26

 C.2. Aset Tetap 27

 C.3 Kewajiban Jangka Pendek 28

 C.4. Ekuitas 29

 D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 29

 D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 29

D.2. Beban Pegawai 29

D.3. Beban Persediaan 30

D.4. Beban Barang dan Jasa 30

D.5. Beban Pemeliharaan 30

D.6. Beban Perjalanan Dinas 30

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31

D.8. Beban Bantuan Sosial 31

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 31

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 31

D.11. Beban Lain-lain 32

D.12. Kegiatan Non Operasional 32

D.13. Pos Luar Biasa 32

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 32

E.1. Ekuitas Awal 32

E.2. Surplus (defisit) LO 32

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 33

E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan 33

E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 33

E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 33

E.3. 5 Koreksi Lain-lain 33

E.3.6 Ekuitas Akhir 34

F. Pengungkapan Penting Lainnya 34

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 34

F.2. Pengungkapan Lain-lain 34

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024	23
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 2023	23
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2024	24
Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024	24

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/fax : (0711)-5723669

e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

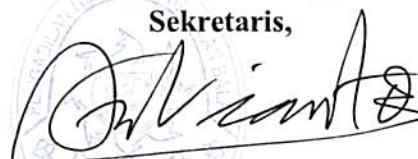
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp4.795.749.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) terealisasi untuk semester I sebesar Rp2.553.938.050,- (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah*).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Aset Semester I Tahun 2024 per 30 Juni 2024 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp36.304.349,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*), Kewajiban sebesar Rp309.572.027- (*tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah*), dan Aset Tetap sebesar Rp36.717.361.583,- (*tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh*

satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebesar Rp309.572.027,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) dan Rp36.444.093.905,- (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Semester I Tahun 2024 untuk periode 2024, pendapatan Operasional sebesar Rp0,- Beban Operasional Rp3,454,648,535,- (*tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(3,451,398,804),- (*tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah*).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp37,344,782,041,- (*tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(3,451,398,804),- (*tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah*) dan Ekuitas akhir sebesar Rp36,444,093,905,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah*).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	PER 30 JUNI 2024		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	3,227,382	0,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	3,227,382	0,00
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3,532,501,000	1,918,912,610	54
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,263,248,000	635,025,440	50
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		4,795,749,000	2,553,938,050	53

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NERACA
PER 30 JUNI 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2023
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	35,400,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	882,000
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	22,349
Jumlah Aset Lancar		36,304,349
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2,819,580,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4,488,132,310
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	32,738,300,861
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	190,000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3,328,841,588)
Jumlah Aset Tetap		36,717,361,583
Jumlah Aset		36,753,665,932
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.3	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3. 1.	251,804,508
Uang Yang Belum Ditagihkan	C.3. 2.	21,485,519
Uang Muka dari KPPN	C.3. 3.	35,400,000
Uang Jangka Pendek Lainnya	C.3. 4.	882,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		309,572,027
Jumlah Kewajiban		309,572,027
EKUITAS		
Ekuitas	C.4	36,444,093,905
Jumlah Ekuitas Dana		36,444,093,905
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		36,753,665,932

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2024	2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,124,528,118	2,141,697,509
Beban Persediaan	D. 3	16,555,500	17,051,200
Beban Barang dan Jasa	D. 4	463,859,787	523,914,759
Beban Pemeliharaan	D. 5	175,524,073	305,968,834
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	27,550,099	19,220,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	646,630,958	337,893,575
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		3,454,648,535	3,345,745,877
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3,451,398,804)	(3,345,124,256)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3,451,398,804)	(3,345,124,256)
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0

Surplus (Defisit) LO	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)
----------------------	-----------------	-----------------

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	37,344,782,041	31,782,520,630	5,562,261,411	17.5
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)	(106,274,548)	3.18
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	0
Koreks Nilai Aset Non Revaluasi	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	0
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,550,710,668	2,938,466,616	(387,755,948)	(13.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(900,688,136)	(406,657,640)	(494,030,496)	121.49
EKUITAS AKHIR	36,444,093,905	31,375,862,990	5,068,230,915	16.15

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 215/PMK./05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. **Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. **Basis Akuntansi**

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. **Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. **Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

- nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp3.227.382

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp3.227.382 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.227.382. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,227,382	3,227,382	0
Total Pendapatan		0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp621,621 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp621,621.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni 2024	2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,227,382	621,621	0	0
Total Pendapatan		0	0	0	

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp
2.553.938.050

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp2.553.938.050,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) dengan anggaran senilai RpRp4,795,749,000,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) . Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I TA 2024 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,532,501,000	1,918,912,610	54
Belanja Barang	1,263,248,000	635,025,440	50
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	4,795,749,000	2,553,938,050	53

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Juni 2024

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp2.553.938.050,- (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), atau sebesar 53% dari anggaran senilai Rp4.795.749.000,- (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah*).

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp1.918.912.610

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2024 Rp1.918.912.610,- (*satu milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah*) dari anggaran awal sebesar Rp3.532.501.000,- (*tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus satu ribu rupiah*)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp635.025.440	Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp635.025.440,- (<i>"enam ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah"</i>) dari anggaran sebesar Rp1.263.248.000,- (<i>satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>)
--	--

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal : Rp0	Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp0,- (<i>nol rupiah</i>) dari anggaran sebesar Rp0,- (<i>nol rupiah</i>)
-------------------------------------	--

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp36.304.349

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp36.304.349,- (*tiga puluh enam juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp35.400.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp35.400.000,- (*tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas:
Rp882.000

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp882.000,- (*delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).Kas Lainnya dan Setara Kas negara merupakan segala bentuk kekayaan tunai yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai, yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga negara untuk keperluan operasional dan pengeluaran.

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak: Rp22.349 Persediaan periode 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp22.349,- (*dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*). Piutang Bukan Pajak negara merupakan uang yang harus diterima oleh pemerintah dari pihak lain, selain dari pajak, seperti denda, biaya administrasi, atau pengembalian kelebihan pembayaran.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 36.717.361.583 Nilai Aset Tetap periode 30 Juni TA 2024 tersaji sebesar Rp36.717.361.583- (*tiga puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah*). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp2.819.580.000 Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp2.819.580.000,- (*dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 4.488.132.310 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp4.488.132.310,- (*empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 32.738.300.861 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp32.738.300.861,- (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*)

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 190.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp190.000.- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*)

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp(3.328.841.588)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp(3.328.841.588),- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp309.572.027

Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp309.572.027,- (*tiga ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah*)

C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga : Rp251.804.508

Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp251.804.508,- (*dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat ribu lima ratus delapan rupiah*). Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.3.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan : Rp251.804.508

Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni TA 2024 Sebesar Rp21.485.519,- (*dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas*). Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.3.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp35.400.000,- (*tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*) Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.3.4 Uang Jangka Pendek Lainnya

Uang Jangka
Pendek
Lainnya :
Rp882.000

Uang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp882.000,- (*delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Uang Jangka Pendek Lainnya merupakan aset keuangan yang dapat segera diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, selain dari uang kas fisik. Biasanya meliputi investasi seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, atau surat berharga pasar uang yang jatuh temponya pendek.

C.4. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
37.344.782.041

Ekuitas periode 30 Juni TA 2024 sebesar Rp36.444.093.905,- (*tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP :
Rp3.227.382

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp3.227.382,- (*tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*).

D.2. Beban Pegawai

Beban
Pegawai : Rp
2.124.528.118

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2024 dan 2023 sebesar Rp2.124.528.118,- (*dua milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua*

puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) dan Rp2.141.697.509,-(*dua milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah*). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
16.555.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.555.500,- (*enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dan Rp17.051.200,- (*tujuh belas juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah*). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp463.859.787*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp463.859.787,- (*delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah*) dan Rp523.914.759,- (*lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp175.524.073*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp175.524.073,- (*seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah*) dan Rp305.968.834,- (*tiga ratus lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah*). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah

Dinas : Rp27.550.099 masing-masing sebesar Rp27.550.099,- (*dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*) dan Rp19.220.000,- (*sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0 Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 646.630.958 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp646.630.958,- (*enam ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*) dan Rp337.893.575,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non operasional untuk periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0,- (*nol rupiah*). dan Rp0,- (*nol rupiah*).

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1.Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp37.344.782.041,- (*tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat puluh satu rupiah*)

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(3.451.398.804),- (*tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah.*") dan Rp(3.345.124.256),- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*).

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- (*nol rupiah*) dan Rp0,- (*nol rupiah*). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp36.444.093.905,- (*tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah*) dan Rp31.375.862.990,- (*tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

- 1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
- 2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
- 3. BSI Cabang Pangkalan Balai A/C 7765554448 a.n. RPL 160 Pdt PN Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi ke-1 tertanggal 14 Maret 2024;
2. Revisi ke-2 tertanggal 4 April 2024;
3. Revisi ke-3 tertanggal 7 Juni 2024.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihil-

LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 401909

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:14 AM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	3,227,382	3,227,382	0	0	621,621	(621,621)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,227,382	3,227,382	0	0	621,621	(621,621)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	3,227,382	3,227,382	0	0	621,621	(621,621)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,795,749,000	2,553,938,050	(2,241,810,950)	53	10,901,932,000	2,921,719,487	7,980,212,513	27
1. Belanja Pegawai	3,532,501,000	1,918,912,610	(1,613,588,390)	54	3,699,983,000	1,930,115,667	1,769,867,333	52
2. Belanja Barang	1,263,248,000	635,025,440	(628,222,560)	50	1,413,335,000	842,438,443	570,896,557	60
3. Belanja Modal	0	0	0	0	5,788,614,000	149,165,377	5,639,448,623	3
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 401909

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:14 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,795,749,000	2,553,938,050	(2,241,810,950)	53	10,901,932,000	2,921,719,487	7,980,212,513	27
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:14 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,400,000	0	35,400,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	882,000	0	882,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	22,349	0	22,349	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	22,349	0	22,349	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	36,304,349	0	36,304,349	
ASET TETAP				
Tanah	2,819,580,000	2,819,580,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,488,132,310	4,488,132,310	0	0.00
Gedung dan Bangunan	32,738,300,861	32,738,300,861	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,328,841,588)	(2,682,210,630)	(646,630,958)	24.11
JUMLAH ASET TETAP	36,717,361,583	37,363,992,541	(646,630,958)	(1.73)
JUMLAH ASET	36,753,665,932	37,363,992,541	(610,326,609)	(1.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	251,804,508	19,210,500	232,594,008	1,210.76
Utang Yang Belum Ditagihkan	21,485,519	0	21,485,519	0.00
Uang Muka dari KPPN	35,400,000	0	35,400,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	882,000	0	882,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	309,572,027	19,210,500	290,361,527	1,511.47
JUMLAH KEWAJIBAN	309,572,027	19,210,500	290,361,527	1,511.47
EKUITAS				
Ekuitas	36,444,093,905	37,344,782,041	(900,688,136)	(2.41)
JUMLAH EKUITAS	36,444,093,905	37,344,782,041	(900,688,136)	(2.41)
JUMLAH EKUITAS	36,444,093,905	37,344,782,041	(900,688,136)	(2.41)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	36,753,665,932	37,363,992,541	(610,326,609)	(1.63)

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 30/07/24 9:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	35,400,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	882,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	22,349	0
0.0	131111	Tanah	2,819,580,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,488,132,310	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	32,738,300,861	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,487,879,368
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	840,962,220
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	224,015,508
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	27,789,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	21,485,519
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	35,400,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	882,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,553,938,050
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,227,382	0
0.0	391111	Ekuitas	0	37,344,782,041
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,249,731
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	988,536,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,490	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,068,720	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,228,040	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,090,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	750,330,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	92,098,692	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	52,939,020	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	91,762,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,115,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	25,729,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	776	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	651,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	3,815,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	398,622,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	622,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	12,750,500	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,051,787	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,713,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:15 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	44,100,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,174,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88,275,073	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27,550,099	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	309,203,628	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	337,427,330	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	16,555,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	75,000	0
JUMLAH			43,540,383,437	43,540,383,437

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:15 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,553,938,050
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,227,382	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,227,382
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	877,054,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,977	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	60,282,060	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,856,412	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16,080,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	666,960,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	85,564,085	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46,855,740	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	110,162,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8,020,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	22,870,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	688	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,800,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	579,360	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,815,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	369,448,400	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	454,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	11,880,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,395,500	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,076,047	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,891,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	35,280,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,174,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,975,894	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,550,099	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	912
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,099,500
JUMLAH			2,559,265,844	2,559,265,844

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Peranggung Jawab UAKPA
Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:12 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,249,731	621,621	2,628,110	422.783
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,249,731	621,621	2,628,110	422.783
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,249,731	621,621	2,628,110	422.783
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,124,528,118	2,141,697,509	(17,169,391)	(0.802)
Beban Persediaan	16,555,500	17,051,200	(495,700)	(2.907)
Beban Barang dan Jasa	463,859,787	523,914,759	(60,054,972)	(11.463)
Beban Pemeliharaan	175,524,073	305,968,834	(130,444,761)	(42.633)
Beban Perjalanan Dinas	27,550,099	19,220,000	8,330,099	43.341
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:12 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	646,630,958	337,893,575	308,737,383	91.371
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,454,648,535	3,345,745,877	108,902,658	3.255
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)	(106,274,548)	3.177
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)	(106,274,548)	3.177
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)	(106,274,548)	3.177

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris


ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 30/07/24 9:13 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	37,344,782,041	31,782,520,630	5,562,261,411	17.5
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,451,398,804)	(3,345,124,256)	(106,274,548)	3.18
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,550,710,668	2,938,466,616	(387,755,948)	(13.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(900,688,136)	(406,657,640)	(494,030,496)	121.49
EKUITAS AKHIR	36,444,093,905	31,375,862,990	5,068,230,915	16.15

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB(005)MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG(01)Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA(401909)PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

ALOKASIRp. 4,795,749,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 6986 6986.EBA	Program Dukungan Manajemen			4,795,749,000	
	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan			4,795,749,000	
	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			4,795,749,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
6986.EBA.994	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,795,749,000	
A	Gaji dan Tunjangan			3,532,501,000	
	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,532,501,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,624,984,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,319,847,000	1,319,847,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	82,095,000	82,095,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	82,095,000	82,095,000	
	- Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 THN	140,947,000	140,947,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			20,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	16,000	16,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			114,934,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,514,000	98,514,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			31,531,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj.Anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,198,000	2,198,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,270,000	2,270,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,140,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,011,540,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,009,350,000	1,009,350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	1,095,000	1,095,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,095,000	1,095,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,795,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			156,140,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	124,638,000	124,638,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			64,698,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
511129	Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	64,698,000	64,698,000	RM
				421,977,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS				RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
511151	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,000	421,977,000	RM
	Belanja Tunjangan Umum PNS			18,920,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	13,360,000	13,360,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
511611	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	RM
	Belanja Gaji Pokok PPPK			37,070,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	RM
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			9,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	RM
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK			3,704,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
511622	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	RM
	Belanja Tunjangan Anak PPPK			1,480,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	105,000	105,000	
511622	- Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	105,000	105,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,795,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	4,200,000 350,000 350,000	4,900,000 4,200,000 350,000 350,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,476,000 289,000 289,000	4,054,000 3,476,000 289,000 289,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,263,248,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			493,791,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN] - KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	12.0 OB 24.0 OB 60.0 OB 1.0 OB 2.0 OB 5.0 OB 1.0 THN	3,683,000 3,683,000 3,348,000 3,683,000 3,683,000 3,348,000 105,204,000	466,461,000 44,196,000 88,392,000 200,880,000 3,683,000 7,366,000 16,740,000 105,204,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000 27,330,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			222,630,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN 12.0 BLN	3,000,000 15,500,000	189,000,000 3,000,000 186,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000 11,630,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000 12,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB(005)MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG(01)Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA(401909)PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

ALOKASIRp. 4,795,749,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522113	Belanja Langganan Air			6,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	Belanja Sewa			4,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
C	Pemeliharaan Kantor			321,103,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			136,032,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	54,500	136,032,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			185,071,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	4.0 UNIT	18,750,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			71,584,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			25,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			46,584,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,326,000	15,912,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	342,000	8,208,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	308,000	3,696,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	352,000	4,224,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	912,000	10,944,000	
E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim			105,840,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 4,795,749,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	Belanja Sewa			105,840,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Sewa rumah dinas hakim [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000	
H	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding			40,300,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40,300,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
I	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	RM
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	200,000	8,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
	Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL			8,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			8,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 31 Juli 2024

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom

NIP 197612032011011005



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2024

Jasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

engan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- . Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- . Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
- . Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- . Kode>Nama Salker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- . ebesar : Rp. 4.795.749.000 (EMPAT MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Intuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

ode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :				Jumlah Uang	
3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Rp.	4.795.749.000
3.04 PERADILAN				Rp.	4.795.749.000
ode dan Nama Program dan Kegiatan :					
05.01.WA	Program Dukungan Manajemen				
05.01.WA.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama				
umber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni					
2. PNBP					
PNBP TA Berjalan					
1. Pinjaman/Hibah Luar Negeri					
- Pinjaman Luar Negeri					
- Hibah Luar Negeri					
encairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN S E K A Y U					
enyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.					

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
I A. INFORMASI KINERJA



nterian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
/insi : (11) SUMATERA SELATAN
e>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I A.
4.795.749.000
4.795.749.000

ogram	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)		
	:	2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		
	:	3. 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)		
	:	4. 04	Kualitas Pelayanan Informasi Publik		
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	
				1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	4.795.749.000
				1,00	4.795.749.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
I B. SUMBER DANA



DS:6091-2891-1426-8230

nterian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
/insi : (11) SUMATERA SELATAN
e>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Anggaran Tahun 2024		Rp.	4.795.749.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Rupiah Murni		Rp.	4.795.749.000		(2) RPLN	US\$	0	0
2. PNBPN		Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung						IDR	0	
(dalam ribuan ru								

o.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register			PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING		
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri			1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -					
	Kode	Uraian		Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

mentarian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
t Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
vinsi : (11) SUMATERA SELATAN
le>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
venangan : (KD)



Halaman : II.
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAI REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749		
	Program Dukungan Manajemen	3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749		
	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749		
986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749	11 . 09	
	(11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)								
01 RM		3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749	160	
	JUMLAH	3.532.501	1.263.248	-	-	-	4.795.749		

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

nenterian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
: Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
: vinsi : (11) SUMATERA SELATAN
le>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
		JANUARI 4	FEBRUARI 5	MARET 6	APRIL 7	MEI 8	JUNI 9	JULI 10	AGUSTUS 11	SEPTEMBER 12	OKTOBER 13	NOVEMBER 14	DESEMBER 15	
2	3													16
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
	RENCANA PENARIKAN DANA	314.210	570.251	422.960	450.007	472.007	447.007	447.007	316.330	313.889	317.598	313.098	411.384	4.791
	BELANJA PEGAWAI	284.755	298.988	296.222	364.629	364.629	364.629	364.629	233.951	233.951	233.951	233.951	258.214	3.531
	BELANJA BARANG	29.455	271.263	126.737	85.378	107.378	82.378	82.378	82.378	79.938	83.647	79.147	153.170	1.261
	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	314.210	570.251	422.960	450.007	472.007	447.007	447.007	316.330	313.889	317.598	313.098	411.384	4.791
005.01.WA.6986	51 BELANJA PEGAWAI	284.755	298.988	296.222	364.629	364.629	364.629	364.629	233.951	233.951	233.951	233.951	258.214	3.531
	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	29.455	271.263	126.737	85.378	107.378	82.378	82.378	82.378	79.938	83.647	79.147	153.170	1.261

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-005.01.2.401909/2024
IV A. B L O K I R



DS:6091-2891-1426-8230

nenterian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
t Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
vinsi : [11] SUMATERA SELATAN
le dan Nama Salker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A.
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2024
IV B. C A T A N



DS:6091-2891-142E-8230

nenterian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
: Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
vinsi : [11] SUMATERA SELATAN
le dan Nama Salter : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B.
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Tingkat Satker (Non BLU)

Periode : Semester I, T.A. 2024

Kode Satker : 401909
Nama Satker : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi
Nama Kementerian : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face per 31 Desember 2015			Ada
2. Neraca per 31 Desember 2015			Ada
3. Laporan Opersional per 31 Desember 2015			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015			Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan			Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi			Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang			Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah			Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA			Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Aset 2015 = Total Aset Audited 2014			Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2015 = Total Kewajiban Audited 2014 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671			Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2015 = Total Ekuitas Dana Audited 2014 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671			Sama
NERACA PERCOBAAN			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak

Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) <i>(kec.Penyisihan dan Akumulasi)</i>			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) <i>(kec.Pengembalian Pendapatan)</i>			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)			Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"			Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.			Ya
2. akun 218211 di kredit			Ya
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)			Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)			Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak

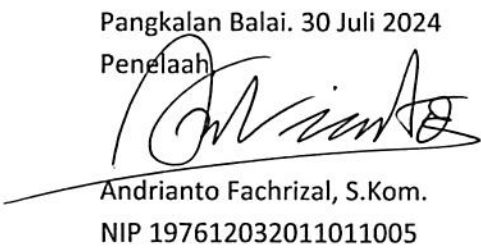
Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif			
9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg
10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
Pengecekan antar laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxx?			Ya
Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Tidak
Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kirim dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK			
Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.			
NERACA			
Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama
Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?			Tidak
Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang			Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada/Tidak

2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak
Beban Persediaan (di LO)			Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL			Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada/Tidak
Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka			Ada/Tidak
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka			Ada/Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar			Ada/Tidak
TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)			
Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			Sama
Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)			Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)			Sama
<i>Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum.</i>			
	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	
Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN			
Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak

akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak
LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?			Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?			Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?			Ya
Pengungkapan Penting Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL			Ya
(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)			

Mengetahui
Kepala Satker,

Nofri Dwi Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 197811252002122002

Pangkalan Balai. 30 Juli 2024
Penelaah

Andrianto Fachrizal, S.Kom.
NIP. 197612032011011005

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan"*



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911
Website : www.pn-pangkalanbalai.go.id, Telpon / Fax : (0711) 5723 669

Pangkalan Balai, 31 Juli 2024

Nomor : 834/SEK.PN.W6-U10/KU2.1/VII/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Laporan Keuangan Periode Desember 2024 DIPA 401909 (*Audited*)
Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Kepada Yth. Kepala KPPN Sekayu
Di-

SEKAYU

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Periode Desember Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini kami kirimkan Laporan Keuangan Keuangan DIPA 01 (401909) Periode Juni Tahun Anggaran 2024, (*Audited*) Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,


ANDRIANTO FACHRIZAL